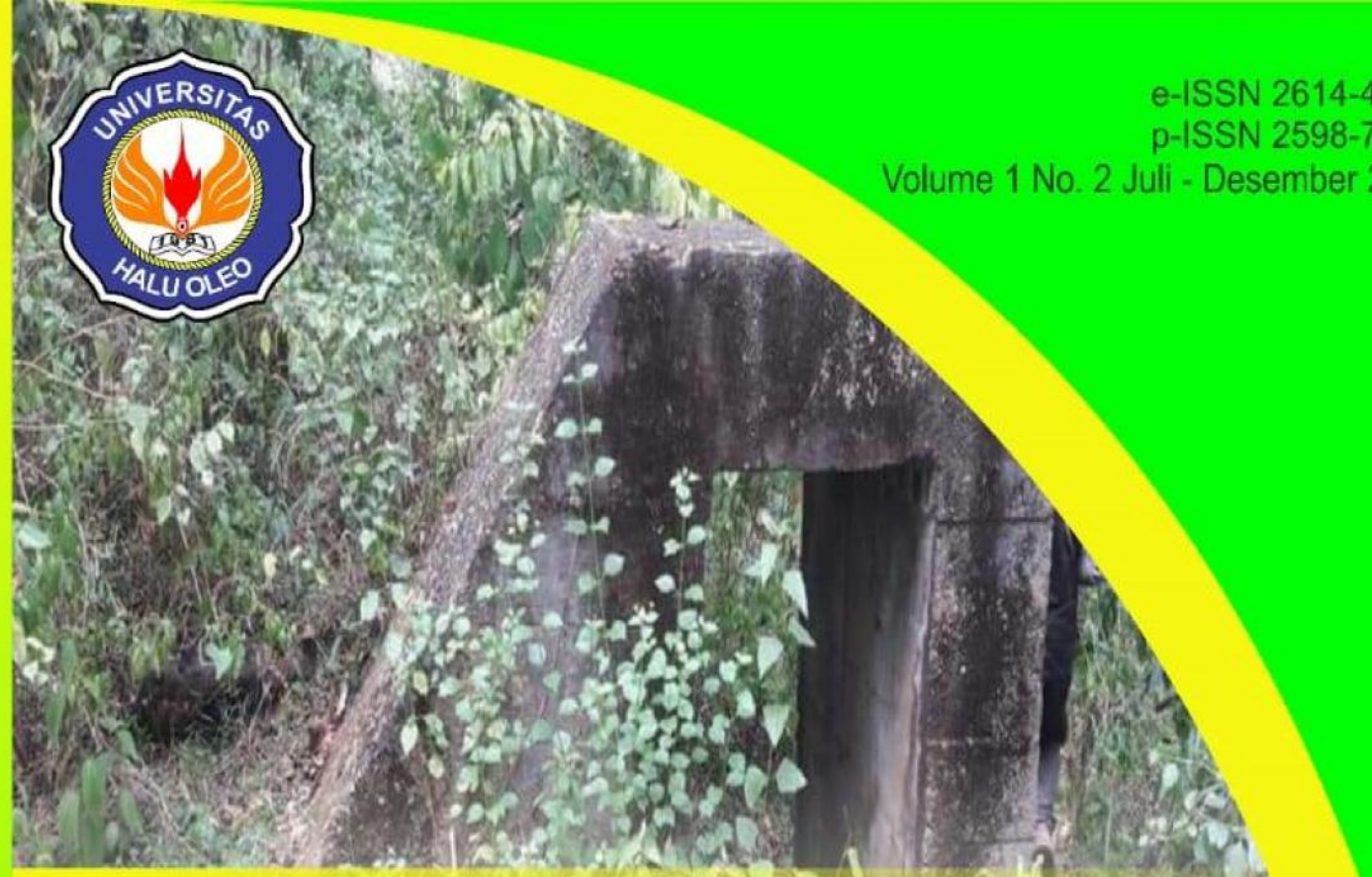
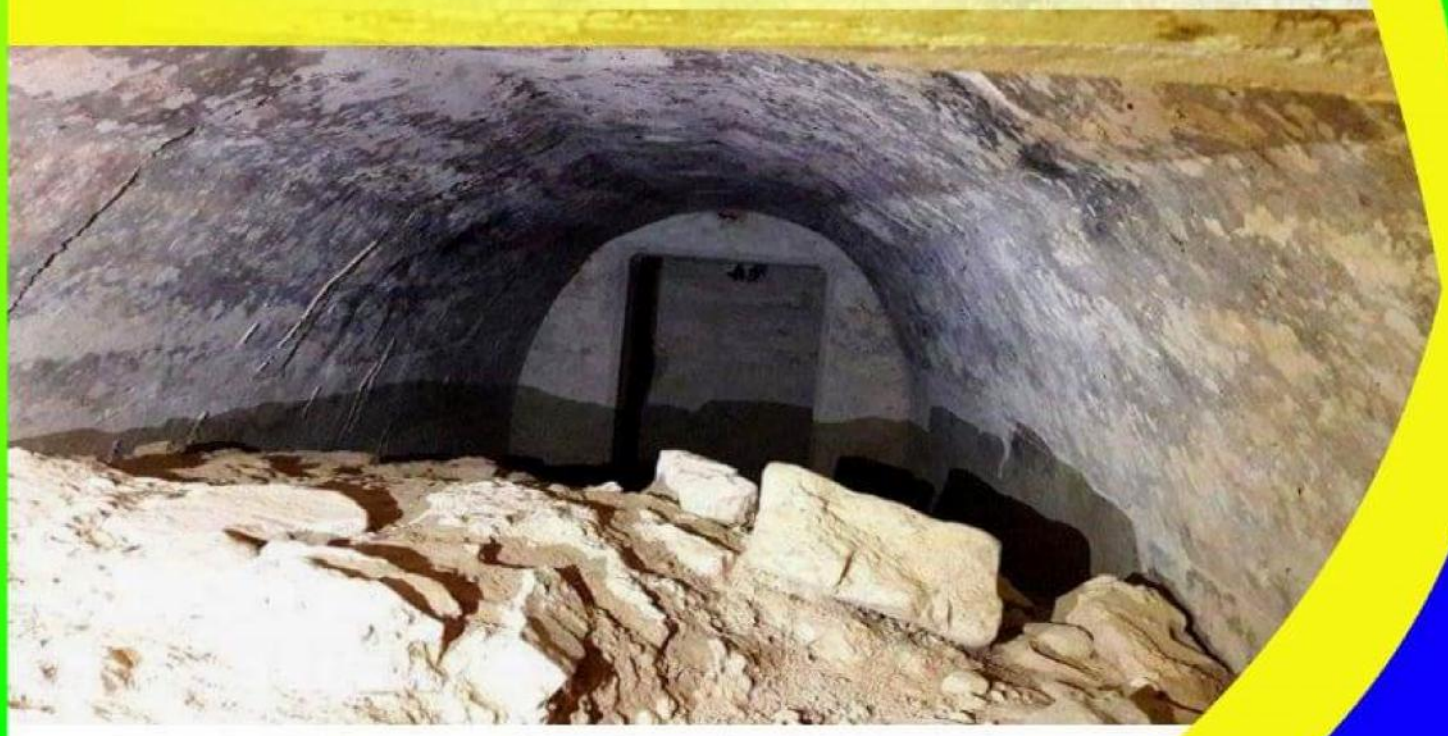
e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828
Volume 1 No. 2 Juli - Desember 2018



JOURNAL IDEA OF HISTORY



Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kendari

JOURNAL IDEA OF HISTORY Volume 1 No. 2 Juli - Desember 2018

DAFTAR ISI

PERJUANGAN LA ODE MUHAMAD IDRUS EFENDY DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI MUNA : 1945-1949 ……..…….. 1-11
Salebaran
Aswati M.

SEJARAH BENTENG BANGKUDU DI KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA ABAD XVIII-XXI …… 12-26
Emilia
Sarman

PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI ORANG JAWA DI DESA LALONGGOTOMI KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE : 1983-2016…… 27-32
Taufiq Insan
Aslim

SEJARAH KELAS SOSIAL MASYARAKAT KERATON: 1942-2004…. ……... 33-43
Muhammad Syahrul Pala
Hamuni

SEJARAH WANITA MUNA PEMECAH BATU DI DESA TANJUNG TIRAM KECAMATAN MORAMO UTARA KABUPATEN KONAWE SELATAN: 1995-2016……..... 44-53
Zahirin
Evang Asmawati

SEJARAH ORANG BAJO DI DESA TONDASI KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN MUNA BARAT : 1980-2016……...……..... 54-63
Nurhayati
La Ode Ali Basri

POLA FORMULA DALAM TUTURAN KABHANTI MODERO PADA MASYARAKAT MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ……..... 64-81
Samsul

MIGRASI ORANG MUNA DI KELURAHAN DODUNG KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT : 1960-2017…… 82-92
Marwina
Hasni Hasan

EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM DWILOGI NOVEL *PADANG BULAN* KARYA ANDREA HIRATA …… 93-102
Faika Burhan

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

SEJARAH KELAS SOSIAL MASYARAKAT KERATON BUTON : 1942-2004

Oleh:
Muhammad Syahrul Pala
Hamuni
(Universitas Halu Oleo)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah kelas sosial pada Masyarakat Keraton Buton: 1942-2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1995) yang terdiri atas (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik, (c) Verifikasi, (d) Interpretasi, dan (e) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Sejarah kelas sosial di Buton merupakan hasil bentukan dari Wa Kaa Kaa. Hal tersebut didasari oleh sistem kerajaan Buton yang menetapkan tongkat kepemimpinan berdasarkan silsilah raja sebelumnya sehingga dibentuklah kasta untuk mengklasifikasi urutan raja. Setiap orang diukur berdasarkan kasta. Hal tersebut tergantung dari garis nasab seseorang. Jika berasal dari kelas *kaomu* yaitu keturunan Wa Kaa Kaa maka seterusnya menjadi *kaomu*, jika nasabnya *walaka* maka seterusnya *walaka* begitupula *Parabela* dan *Babatua*. (2) Bentuk dan fungsi kelas sosial dalam masyarakat Buton memiliki bentuk yang beragam, *kaomu* terbentuk dari nasab bangsawan melalui Wa Kaa Kaa dan berfungsi sebagai Raja, *walaka* terbentuk dari nasab garis keturunan bangsawan yaitu *mia patamia* dan berfungsi sebagai pemilih dan melantik raja dari kelas *kaomu*, dan *parabela* terbentuk dari loyalis kerajaan Buton yang berfungsi menjaga *kadhie,* dan *babatua* merupakan bentuk budak pelayan kerajaan. Kasta tersebut berpengaruh di bidang sosial politik masyarakatnya.

Kata Kunci: Sejarah, Kelas Sosial, Keraton Buton

1. Pendahuluan

Di berbagai daerah di Indonesia terdapat system pelapisan sosial, yakni lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah yang disertai dengan gelar-gelar atau atributnya. Lapisan tersebut membeda-bedakan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Terwujudnya pelapisan sosial dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui pelapisan sosial, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui kedudukan serta fungsinya dalam masyarakat.

Salah satu bentuk pelapisan tersebut yakni pelapisan kelas sosial atau struktur sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat Buton misalnya terdapat lapisan-lapisan sosial dalam masyarakatnya. Sistem pelapisan sosial masyarakat Buton terdiri dari *kaomu, walaka, papara*, serta golongan *babatua.* Schroorl (2003) menyebutkan bahwa golongan *kaomu* (ningrat atau bangsawan) menurun dari garis keturunan bapak, pasangan raja pertama. Para penguasa (sultan) dipilih dari *kaomu* itu. Kemudian berkembang kebiasaan meletakkan sebuah gelar di depan nama para anggota golongan masyarakat itu. Kaum laki-laki diberi gelar La Ode dan perempuan bergelar Wa Ode. Pada masa itu golongan *kaomu* adalah golongan masyarakat yang dapat menduduki peran-peran pemerintahan seperti jabatan *sultan, sapati*, dan pangkat *kadie* yakni *lakina* dan *bobato.* Lapisan kedua disebut *walaka,* mencakup golongan elit penguasa yang para wakilnya memilih sultan. Golongan ini diturunkan dari garis bapak para pendiri Kesultanan Buton melalui suatu sistem perkawinan di mana seorang laki-laki *kaomu* yang mengawini seorang *walaka*. Para wakil *walaka* dapat memilih, atau jika perlu memecat seorang penguasa.

Lapisan ketiga dalam masyarakat Buton ialah penduduk desa yang dinamakan *Papara.* Papara merupakan masyarakat otonom atau kaum yang memiliki *kadie.* Di *kadie* mereka berpeluang menduduki jabatan dalam organisasi desa. Akan tetapi, mereka tidak diperhitungkan menduduki jabatan penting di Kesultanan. Lapisan keempat adalah *Batua,* yakni budak yang biasanya bekerja untuk para *kaomu* dan *walaka*. Para *babatua* biasanya membentuk suatu kelompok di pusat kesultanan dan desa-desa.

Kelas sosial masyarakat Keraton Buton yang terdiri dari *kaomu*, *walaka, papara*, dan *babatua*, tampaknya masih menjadi suatu bahan diskusi masyarakat Buton terutama yang terkait dengan proses terbentuknya kelas-kelas sosial tersebut. Berdasarkan informasi awal ditemukan bahwa ada pandangan yang menyatakan proses pembentukan kelas sosial khususnya *kaomu* dan *walaka* bermula ketika Wa Kaa Kaa dilantik menjadi Raja Buton. Wa Kaa Kaa berkeinginan agar keturunan langsung dari kerajaan Buton memiliki perbedaan dengan garis keturunan masyarakat lainnya.

Demikian pula halnya dengan asal mula struktur Walaka sebagai gelar kebangsawan kedua di kerajaan Buton. Konon struktur sosial sebagai *walaka* dihubung-hubungkan dengan kedatangan "Mia Patamiana" di kerajaan Buton. Mia Patamiana adalah bangsawan dari Kerajaan Johor Malaysia yang menetap di kerajaan Buton dan menjadi bagian dari kerajaan Buton melalui pernikahan politik.

Mencermati cerita asal-usul *kaomu* dan *walaka* tersebut, tampaknya kelas sosial di kerajaan Buton patut untuk dikaji secara ilmiah dalam presprektif sejarah. Apalagi kelas sosial di kerajaan Buton memiliki konteks sejarah yang berbeda-beda dan memiliki fungsi sosial politik yang berbeda pula. Berbicara tentang kelas sosial berarti berbicara tentang perbedaan kedudukan di dalam masyarakat yaitu adanya pembagian-pembagian kelas di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi dengan sendirinya seiring dengan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sorokin dalam Soekanto (2013), mengemukakan bahwa kelas sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya terlihat dengan adanya kelas-kelas yang lebih tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya antara anggota-anggota masyarakat.

Pada dasarnya lapisan sosial masyarakat tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan, tetapi juga adanya kemampuan manusia menilai perbedaan dengan menerapkan berbagai kriteria. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia menganggap adanya sesuatu yang dihargai menjadi bibit yang menciptakan sistem sosial yang berlapis-lapis. Ukuran atau kriteria yang biasa disepakati untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2013), adalah sebagai berikut :

a. Ukuran kekayaan, ukuran kekayaan (kebendaan) dapat dilihat misalnya harta yang dimiliki di mana kekayaan (materi) menjadi ukuran.
b. Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar akan menempati lapisan tertinggi.
c. Ukuran kehormatan, orang yang paling disegani dan dihormati menempati posisi atas, ini biasa di jumpai pada masyarakat tradisional
d. Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sebagai ukuran yang disepakati oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan.

Pada masyarakat tradisional, secara umum kedudukan seseorang sangat ditentukan oleh faktor turunan yang diwarisi seseorang dari orang tuanya. Pada masyarakat tradisional dikenal tiga tingkatan kelas sosial yaitu: pertama bangsawan, adalah tingkatan kelas sosial teratas, yang berada pada kelas yaitu anak keturunan raja atau bangsawan. Kedua mahardika, adalah tingkatan sosial

menengah yang diduduki oleh kaum tetua atau tokoh adat juga para saudagar (pedagang).Yang ketiga, budak adalah tingkatan sosial terendah, yang berada pada kelas ini adalah para jelata atau kaum miskin (http://faisal-wibowo.blogspot.com/2013/01/agama-dan-kelas-sosial.html).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kelas sosial merupakan hasil dari suatu proses-proses sosial yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat. Hasil dan proses tersebut kemudian membentuk suatu kelompok masyarakat yang baru.

Selanjutnya Contens dalam Susanto (1985), mengemukakan beberapa indikator penilaian subjektif mengenai pelapisan sosial masyarakat :

a. Bentuk rumah, ukuran dan kondisi perawatan rumah dan tata kebun.
b. Wilayah atau tempat tinggal lingkungan, karena wilayah atau tempat tinggal lingkungan menentukan status.
c. Pekerjaan atau profesi yang dipilih seseorang menunjukkan keinginan (identitas diri).
d. Sumber pendapatan menentukan seseorang.

Perbedaan atas lapisan-lapisan sosial merupakan gejala universal yang menjadi bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk mengetahui terjadinya proses pelapisan-pelapisan dalam masyarakat, Soekanto (1980), mengemukakan pokok-pokok yang dapat dijadikan pedoman adalah sebagai berikut :

a. Sistem kelas berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu dan menjadi objek penyelidikan.
b. Sistem kelas dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
    1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka kejahatan), wewenang dan sebagainya.
    2. Sistem pertentangan yang diciptakan warga masyarakat.
    3. Kriteria sistem pertentangan berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan dan nilai-nilai
    4. Solidaritas antara individu-individu atau kelompok sosial yang menduduki kedudukannya yang lama dalam sistem sosial masyarakat.
    5. Lambang-lambang atau kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan sebagainya.

Pembentukan lapisan-lapisan dalam masyarakat merupakan suatu proses sosial. Suatu struktur sosial adalah proses tata kelakuan yang berhubungan dan berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Sistem kelas sosial merupakan salah satu unsur pokok yang mencerminkan adanya kedudukan atau status dan peranan. Dengan demikian maka kedudukan dan peran merupakan inti pokok dalam kelas sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedudukan atau status sosial dapat diperoleh secara sengaja atau tidak sengaja melalui kelahiran, usaha yang disengaja, berdasarkan kekuasaan dan kewenangan, pengakuan orang lain atau kedudukan yang diberikan oleh orang lain.

2. Pembahasan

2.1 Sejarah Kelas Sosial Masyarakat Keraton Buton

2.1.1 Fase Awal

Kerajaan Buton digagas oleh *mia patamia* yang berasal Johor yaitu Si Panjonga, Si Jawangkati, Si Tamanajo, dan Si Malui. Para penggagas tersebut mendirikan kerajaan Buton dan

memilih Wa Kaa Kaa sebagai raja pertama. Pertama-tama masyarakat di dalam wilayah ini didefinisikan kedalam orang Wolio dan bukan Wolio. Dua kategori sosial yakni *kaomu* dan *walaka*, termasuk ke dalam kategori orang Wolio. Sebaliknya dua kategori sosial yag terakhir, yakni *papara* dan *babatua* merupakan kategori bukan orang Wolio (Darmawan 2012). Berdasarkan kelas sosial kemasyarakatan maka dapat disebutkan bahwa penduduk kerajaan Buton terdiri atas empat golongan. Informan bernama H. L.M. Razinuddin menyatakan bahwa:

> "Ada empat kelas sosial pada awal kerajaan yaitu, kaum bangsawan yaitu kaum *kaomu*, kaum *walaka*, kaum *papara* dan kaum *babatua*. Mereka merupakan keturunan dari *Mia Patamiana* yang berasal dari Sriwijaya dan Majapahit" (Wawancara 07 Agustus 2017).

Penjelasan mengenai kelas sosial dalam lingkup sejarah perkembangannya juga dijelaskan oleh informan bernama Al Mujazi Mulku Zahari. Informan tersebut menyatakan bahwa:

> "Awal dari pembentukan kelas sosial berawal dari kedatangan Si Panjonga yakni orang sakti yang berasal dari suku melayu di negeri Pasai. Ia meninggalkan negeri asalnya pada tiga likur malam bulan Sa'ban tahun 634 Hijriah dengan mengajak Si Tamanajo sebagai pembantu utamanya serta 40 orang kepala keluarga sebagai pengikutnya. Kepergian rombongan besar ini dari negeri asalnya mencari daerah yang telah diberitakan oleh leluhurnya untuk ditempati. Perjalanan itu menghabiskan waktu selama berbulan bulan dengan melintasi daratan dan menyeberangi samudera menggunakan bahtera yang bernama *Lakuleba*. Di buritan bahtera dikibarkan bendera kerajaan leluhurnya yang berwarna hitam putih selang seling. Dalam bahasa Wolio-Buton, bendera ini disebut Longa-Longa. Nama armada yang digunakan oleh Si Panjonga dan pembantu utamanya serta para pengikutnya diabadikan menjadi sebuah nama perkampungan di sebuah desa di Kabupaten Buton yang disebut Desa Lakaliba" (Wawancara 03 Agustus 2017).

Pada tahun 1236 M, armada Si Panjonga dan pengikutnya mendarat di salah satu daratan negeri Buton. Sesampai di negeri baru itu, armada tersebut mencari sebuah lokasi dataran tinggi agar mudah melakukan pengawasan serta menjaga kemungkinan adanya serangan musuh. Rombongan manusia besar dan sakti ini membuat benteng pada sebuah bukit yang diberi nama *Tobe-tobe*. Setelah membuat benteng, armada tersebut kembali mendatangi lokasi pertama untuk mengibarkan bendera kerajaan leluhurnya. Maka dibuatlan sebuah lubang di salah satu tempat yang dikelilingi benteng untuk mengibarkan bendera tersebut yang disebut Sulaa. Hingga saat ini nama tempat tersebut tidak pernah berubah dan diabadikan menjadi sebuah nama kelurahan yaitu Kelurahan Sulaa yang berada di wilayah Kecamatan Betoambari. Namun, benteng tempat pengibaran bendera tersebut telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa waktu pascapembuatan benteng dan pengibaran bendera, kehidupan di *Tobe-tobe* mulai berjalan baik. Si Panjonga meminta kepada pembantu utamanya Si Tamanajo untuk mengajak sebagian pengikutnya untuk mencari daerah baru sebagai tempat tinggal dan mengembangkan keturunannya. Perintah ini disahuti Si Tamanajo dan langsung berpamitan kepada pimpinannya Si Panjonga serta rombongan yang ditinggalkan. Rombongan kecil yang dipimpin Si Tamanajo ini meninggalkan Sulaa menyusuri pantai Buton menuju Teluk Bungi Todanga (Sekarang wilayah Kecamatan Kapontori). Rombongan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah dataran tinggi yang berada di sebelah Timur Laut dari tempat kediaman pimpinannya Si Panjonga di Tobe-Tobe. Karena lokasi tersebut dinilai cukup nyaman, akhirnya Si Tamanajo memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan membuat perkampungan. Selain itu, Si Tamanajo juga membangun benteng pertahanan di puncak gunung yang disebutnya Lambelu dan memberi nama bentengnya Benteng Kamosope.

Benteng tersebut hingga kini masih tetap ada dan dilengkapi dengan dua pucuk meriam yang posisinya berlawanan arah. Satu pucuk moncongnya mengarah ke Barat dan moncong lainnya

mengarah ke sebelah timur. Setelah perkampungan dan pembuatan benteng selesai, Si Tamanajo memerintahkan kepada rombongannya untuk mengibarkan bendera *longa-longa*.

Selain itu, terdapat juga informasi yang menjelaskan bahwa terdapat rombongan yang dipimpin Si Malui yang terdampar di sebelah Utara Timur Laut negeri Buton. Kedatangannya hampir bersamaan dengan kedatangan Si Panjonga. Daerah pendaratan pertama di wilayah Kamaru dengan bentengnya yang disebut Wonco. Sama halnya dengan Si Panjonga, Si Malui juga memerintahkan pembantu utamanya untuk mencari daerah hunian baru. Wilayah yang dikunjungi Si Sajawangkati atas perintah Si Malui adalah wilayah yang diberi nama Wasuembu. Si Sajawangkati langsung mendirikan pemukiman dan benteng pertahanan yang diberi nama Benteng Koncu di Wabula. Selanjutnya dibuatlah sebuah lubang untuk mengibarkan bendera di daerah Kamaru.

2.1.2 Fase Kesultanan

Pada zaman kesultanan, kelas sosial sangat mempengaruhi bentuk dan proses keberlangsungan kesutanan. Hal ini disebabkan kelas mempengaruhi penghargaan sosial di masyarakat kesultanan Buton. Masyarakat Buton merupakan masyarakat yang pluralistik, terdiri atas beberapa etnis pendatang dan beberapa etnis asli. Pada masa kerajaan, kelas masyarakatnya belum tertata secara kongkret, yakni hanya melingkupi pembagian atas golongan penguasa dan golongan rakyat yang diperintah. Golongan penguasa adalah para pendiri kerajaan dan golongan yang diperintah adalah beberapa daerah atau kerajaan-kerajaan kecil yang berintegrasi ke dalam kerajaan Buthuuni.

Penjelasan mengenai kelas sosial pada masa kesultanan dijelaskan oleh informan bernama Al Mujazi Mulku Zahari yang menyatakan bahwa:

> "Kelas masyarakat diambil dari garis keturunan Wa Kaa Kaa dengan Sibatara, kemudian anak Wa Kaa Kaa yaitu Bulawambona melakukan perkawinan dengan La Baluwu, yang dari keturunan-keturunan mereka tersebut kemudian menjadi dasar penentuan kelas masyarakat (sebagai golongan penguasa" (Wawancara 03 Agustus 2017)

Dalam perkembangannya, perkawinan Ratu Bulawambona dengan La Baluwu melahirkan seorang anak yaitu Bataraguru, dan perkawinan antara La Baluwu dengan gundiknya melahirkan sembilan orang anak yang menjadi saudara dari Bataraguru. Inilah yang kemudian menjadi Sio Limbona. Bataraguru menggantikan kedudukan ibunya sebagai raja ketiga, sedangkan saudara-saudaranya yang lain menduduki jabatan Bonto. Raja Bataraguru melahirkan tiga orang anak, yaitu Tuamaruju menjadi Bontona Baluwu, Rajamanguntu menjadi Bontona Peropa dan Tua Rade menjadi Raja IV mengganti Raja Bataraguru. Dari dasar inilah kemudian diambil pembagian kelas masyarakat Buthuuni.

Hal lainnya juga dijelaskan oleh informan bernama Asra yang menjelaskan mengenai kelas sosial pada masa kesultanan bahwa:

> "Pada masa awal pembagian kelas masyarakat Buton mulai diadakan kesepakatan bersama oleh para pembesar kesultanan Buthuuni pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin yang diselaraskan dengan Undang-Undang Kesultanan yaitu Murtabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh. Pada masa kekuasaanya, Sultan Dayanu Ikhsanuddin bermusyawarah dengan Syara (baik Sara Ogena maupun Sara Kidina) dan menghasilkan kesepakatan tentang pembagian kelas masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan Kabumbu Taluanguna yaitu : Golongan Lalaki, Walaka dan Papara" (Wawancara 05 Agustus 2017)

Melalui uraian penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai penggunaan kelas sosial dalam kegiatan Kesutanan Buton yaitu:

1. *Kaomu* atau *kaumu* (kaum ningrat), yaitu keturunan garis bapak dari pasangan raja pertama. Laki-laki dari golongan ini mempunyai nama depan *La Ode* dan perempuan bernama *Wa Ode*.
2. *Walaka*, yaitu keturunan menurut garis bapak dari *Founding Fathers* Kerajaan Buton (*mia patamiana*). *Walaka* termasuk elit penguasa. Melalui sistem tertentu, lelaki *kaomu* boleh menikahi perempuan *walaka*.
3. *Papara* atau disebut juga "orang gunung" yaitu anggota masyarakat biasa yang tinggal di wilayah *kadie* (desa) dan masih merdeka. *Papara* disebut juga *budak adat* dan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tertentu di wilayah *kadie*, tetapi sama sekali tidak mempunyai jalan kepada kekuasaan di pusat.
4. *Babatua* (budak) yang berhak diperjualbelikan atau dijadikan hadiah
5. *Analalaki* dan *Limbo*. Golongan tersebut adalah golongan *kaomu* dan *walaka* yang diturunkan derajatnya karena melakukan kesalahan sosial dan bersikap tidak pantas sesuai dengan status sosialnya.

2.1.3 Fase Kemerdekaan

Pada fase kemerdekaan, masyarakat Buton awalnya tidak didogma bahwa seseorang lahir dan ditakdirkan menjadi seorang *kaomu* atau *papara* tetapi pengklasifikasian dilakukan sesuai dengan kualitas serta kemampuan individu yang dimiliki oleh seseorang. Masuknya seseorang dalam golongan tertentu bukan atas perintah atau aturan tertentu tetapi merupakan hasil penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Sejarah perkembangan struktur masyarakat Buton kemudian muncul dan faktor-faktor pemahaman dasar terkait konsep golongan ini bergeser dari makna asalnya yaitu menjadi semacam konsep kelas dalam masyarakat feodal.

Pergeseran makna ini begitu jauh seiring berjalanya waktu. Lambat laun, konsep ini menjadi hukum besi yang dikukuhkan sebagai salah satu aturan main pemerintahan. Hal ini dilihat dari silsilah raja atau sultan yang memerintah di kerajaan Buton bahwa pemberian gelar La Ode sebagai tanda gelar kebangsawanaan nanti diadakan pada sultan ke 36 yang mana sebelumnya gelar ini tidak terdapat langsung pada nama sultan-sultan terdahulu. Dalam perkembangannya, sejarah kelas sosial pada masyarakat Buton pada 1960 hingga saat ini telah mengalami pergeseran kesakralan, fungsi dan kedudukannya di masyarakat.

Sejarah perkembangan peradaban masyarakat Buton adalah sebuah konsep yang dipahami dan dijelaskan sebagai warisan budaya dan kearifan lokal yang membedakannya dengan masyarakat adat lainnya. Penjelasan mengenai kelas masyarakat Buton oleh Al Mujazi Mulku juga membuktikan bahwa di dalam kelas sosial, masyarakat Buton tidak membedakan jenis kelamin atau pun usia. Hal ini memberikan pemahaman bahwa di dalam sejarah perkembangan kelas masyarakat Buton tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Penegasan informasi mengenai kelas dalam masyarakat Buton dan sejarahnya diungkapkan oleh Al Mujazi Mulku Zahari yang mengatakan bahwa:

> "Kelas sosial dalam masyarakat Buton sangat mempengaruhi kekuasaan dalam pemerintahan namun tidak bersifat absolut, sebab ada pedoman dan lembaga adat yang mengatur dan mengontrol perilaku pemimpin, kebijakan serta aturan yang diterapkan. Dalam perjalanan sejarah kelas sosial tidak mempengaruhi hukum dan aturan hukum yang berlaku. Kelas *kaomu*, *walaka*, *papara* serta *babatua* memiliki kesamaan dalam hukum kesultanan sehingga pemimpin dari kelas bangsawan seperti *walaka* dan *kaomu* tidak semena-mena dalam menerapkan aturan dan adat. Itulah keistimewaan Kesultanan Buton di tengah hegemoni kelas sosial yang membedakan kelas masyarakatnya namun hukum tetap berlaku universal atas semua golongan dan kelas" (Wawancara 03 Agustus 2017).

2.2 Bentuk dan Fungsi Kelas Sosial pada Situasi Politik di Masyarakat Buton

2.2.1 Kaomu

Kaomu (kaum ningrat/bangsawan) adalah keturunan dari Wa Kaa Kaa. Raja/Sultan dipilih dari golongan ini. Golongan *Kaomu* (Lalaki) adalah golongan masyarakat yang berhak menduduki jabatan sultan, sapati, kenepulu, kapitalao dan Bobato yang kesemuanya adalah jabatan pembesar kesultanan dalam Syara Ogena, sedangkan pada Syara *Kidina*/Agama, Kaomu (Lalaki) berhak menduduki jabatan Lakina Agama, Imam, dan Khatib. Hal ini didasarkan atas hasil musyawarah bersama antara pembesar kesultanan dan majelis syara pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan IV).

Pemahaman informasi mengenai bentuk kelas *kaomu* dijelaskan oleh informan Bapak H. L.D. M Razinuddin yang menyatakan bahwa:

"Kaomu merupakan hasil musyawarah yang menghasilkan kesepakatan dalam pengisian jabatan-jabatan dalam kesultanan Buthuuni (*sultan*, *sapati*, *kenepulu* dan *kapitalau* pada *sara ogena*) dan pengisian jabatan dalam aparat mesjid (lakina agama, imam dan khatib). Hasil kesepakatan menyatakan bahwa hak untuk *kaomu* atas jabatan sultan yaitu: pertama, golongan *kaomu* dari Tanailandu anak keturunan La Elangi/Dayanu Iksanuddin (saat menjabat sebagai Sultan ke IV). Kedua, golongan *kaomu Tapi-Tapi* anak keturunan dari La Singga (saat itu menjabat sebagai Sapati) dan golongan *kaomu* Kumbewaha anak keturunan dari La Bula (saat itu menjabat sebagai Kenepulu). Ketiga golongan *kaomu* inilah yang kemudian dikenal dengan Kamboru-mboru Talu Palena (tiga tiang pancang)" (Wawancara 07 Agustus 2017)

Kesepakatan tersebut pada dasarnya mengukuhkan sistem politik kesultanan Buthuuni, di mana yang berhak menduduki jabatan-jabatan tinggi kesultanan (sultan, sapati, kenepulu) dan jabatan Sara Kidin/Sara Agama (lakina agama, imam dan khatib) adalah dari keturunan La Elangi/Dayanu Iksanuddin, La Singga dan La Bula. Keturunan mereka bertiga inilah yang kemudian dikenal dengan golongan *kaomu*.

Kaomu dalam pemerintahan Buton merupakan kelas keturunan dari Wa Kaa Kaa yang merupakan garis keturunan bangsawan. Fungsi *kaomu* dalam kelas sosial masyarakat Buton seperti yang diungkapkan oleh informan H. L.M. Razinuddin.yang menyatakan bahwa:

"Kaomu merupakan kelas nasab kepemimpinan kerajaan Buton melalui Wa Kaa Kaa, melalui kelas *kaomu* maka pemimpin itu lahir sebagai pengganti raja sebelumnya. Tidak akan ada pemimipin dari kelas lain selain kelas *kaomu*" (Wawancara 07 Agustus 2017).

Kelas sosial dalam masyarakat Buton memiliki kekuasaan yang luas dalam bentuk fungsi dan tugasnya. Kelas *kaomu* merupakan kelas kepemimpinan dalam sistem kerajaan Buton.

2.2.2 Walaka

Golongan *walaka* adalah golongan masyarakat kesultanan Buton yang berhak menduduki jabatan Sio Limbona (Majelis Syara), bonto ogena dan bonto (syara ogena), dan moji pada Syara Kidina/Agama. Namun demikian jika ditarik garis keturunannya ke atas, maka kedua golongan yaitu *kaomu* dan *walaka* akan bersatu atau bertemu pada satu silsilah garis keturunana yaitu dari La Baluwu dan Bulawambona (mereka inilah yang disebut nenek). Anak Baluwu dengan Bolawambona, yaitu Bataraguru (Raja III) inilah yang melahirkan golongan Kaomu/Lalaki, sedangkan saudara-saudara Bataraguru yang sembilan orang dari anak La Baluwu dengan istrinya yang lain menurunkan golongan Walaka.

Pernyataan informan bapak H. L.M Kariu yang menyatakan mengenai fungsi Walaka dalam masyarakat Buton, yakni:

> "Walaka berfungsi sebagai kelas yang berhak memilih dan melantik raja yang berasal dari kelas *kaomu*, sehingga hubungan erat *kaomu* dan *walaka* dalam kerajaan Buton itu sangat erat secara fungsi".(Wawancara 08 Agustus 2017).

Fungsi *walaka* dalam struktur masyarakat Buton memiliki fungsi yang sangat penting dikarenakan *walaka* berhak memilih dan melantik raja dari kelas *kaomu*.

2.2.3 Papara/Parabela

Papara tidak mempunyai garis silsilah keturunan dari kedua golongan tersebut (*kaomu* dan *walaka*). *Papara* adalah penghuni daerah kekuasaan kerajaan yang dikenal dengan *kadie* dan *limbo*. Sesuai asal usulnya, ada papara keturunan dari masyarakat asli sebelum berdirinya kerajaan Buton. Ada pula *papara* yang datang dari luar dan tunduk di bawah kekuasaan kerajaan/kesultanan dengan sukarela yang disebut bante. *Papara* terdiri atas tiga bagian yaitu; Paraka adalah rakyat yang menyerahkan diri pada Syara dengan tidak melalui perang, Talubinara adalah rakyat yang berasal dari tawanan perang dan Kantinale adalah budak yang menaklukan diri pada orang-orang yang berkuasa.Lapisan masyarakat terbawah adalah Batua yang berasal atau diturunkan akibat ibu bapaknya yang budak.Namun jika ibunya saja yang budak, maka keturunannya tidak masuk dalam keturunan ini, tetapi mengikuti derajat bapaknya.

Pemahaman mengenai fungsi *papara* dalam kelas masyarakat Buton dijelaskan oleh informan Imran Kudus yang menyatakan bahwa:

> "*Papara* berfungsi menjaga *Kadhie* atau wilayah kerajaan Buton. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan warga, kerajaan serta kadhie dari serangan musuh" (Wawancara 09 Agustus 2017).

2.2.4 Babatua

Babatua adalah budak dalam kelas sosial masyarakat Buton. *Babatua* merupakan pekerja yang melayani kerjaan baik individu pejabat maupun secara kolektif melayani kerajaan saat itu. Seperti yang diungkapkan oleh informan bapak Al Mujazi Mulku yang menyatakan bahwa:

> "Babatua orang yang tunduk di bawah kekuasaan kerajaan dengan paksa dalam adat yang di sebut Bante, musuh kerajaan yang kalah dalam peperangan, dan orang di luar kerajaan yang dirampas dan dijual kepada golongan kaomu dan walaka".(Wawancara 03 Agustus 2017).

Kelas Babatua tidak banyak memiliki sejarah panjang dikarenakan kelas mereka tidak memiliki peran dalam pemerintahan. Tugas *babatua* hanyalah melayani kerajaan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan Bapak H. L.M Kariu yang menyatakan bahwa:

> "Babatua itu merupakan masyarakat yang tunduk pada kerajaan dan tugasnya melayani kerajaan dan dari garis keturunan mereka akan menjadi budak pula" (Wawancara 08 Agustus 2017).

Maka dapat disimpukan bahwa *babatua* merupakan kelas yang hidup dalam pemerintahan Buton dan bertugas sebagai budak atau pekerja.

2.3 Fungsi dan Bentuk Kelas Sosial pada Situasi Politik di Masyarakat Buton

Kelas sosial dalam masyarakat berpengaruh terhadap gejolak perpolitikan di Buton, sebab kelas-kelas yang terbangun di masa lalu mempengaruhi kondisi perpolitikan di Buton. Faktualisasi informan seperti yang diungkapkan oleh Al Mujazi Mulku Zahari menyatakan bahwa:

> "Kelas sosial yang terbangun dalam struktur masyarakat Buton secara tidak langsung mempengaruhi pola perpolitikan di Buton. Hal ini tergambar dari figur-figur yang tampil, selain berlatarbelakang politik atau pengusaha, juga memiliki latar belakang sejarah strata sosial. Hal tersebut mempengaruhi elektabilitas dan kepercayaan diri para figur" (Wawancara 03 Agustus 2017).

Pernyataan informan menunjukkan bahwa kelas sosial dalam perpolitikan di Buton secara tidak langsung memiliki peran dan andil tersendiri. Politik erat hubungannya dengan figur dan penerimaan masyarakat. Masyarakat Buton melihat penerimaan figur terbentur dari kelas sosial figur tersebut. Dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu itu disebut dengan kelas sosial. Kelas sosial atau pelapisan sosial secara umum dapat diartikan sebagai pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Kelas sosial merupakan gejala sosial yang sifatnya umum pada setiap masyarakat.Bahkan pada zaman Yunani Kuno, Aristoteles (384–322 SM) telah menyatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara selalu terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

Pemaparan lainnya juga disampaikan oleh informan Imran Kudus yang menyatakan bahwa:

> "Kelas sosial mempengaruhi figur dalam pemilihan kepala daerah di Buton khususnya di Kota Baubau, sebab background kelas sosial di masa lalu memiliki daya tarik dalam pemahaman masyarakat Buton. Bagi mereka orang dari kelas *walaka* dan *kaomu* memiliki tolak ukur kepemimpinan sebab dari nazab mereka pemimpin-pemimpin kesultanan itu hadir" (Wawancara 07 Agustus 2017).

Setiap manusia memiliki status atau kedudukan dan peranan sosial tertentu sesuai dengan struktur sosial dan pola-pola pergaulan hidup di masyarakat. Dalam setiap struktur, setiap manusia memiliki kedudukan dan menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Kedudukan dan peranan mencakup tiap-tiap unsur dan struktur sosial. Jadi, kedudukan menentukan peran, dan peran menentukan perbuatan (perilaku). Dengan kata lain, kedudukan dan peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Semakin tinggi kedudukan dan peranan seseorang, semakin beragam pula interaksinya dengan orang lain. Interaksi seseorang berada dalam struktur hierarki, sedangkan peranannya berada dalam setiap unsur-unsur sosial tadi. Jadi status atau kedudukan merupakan posisi seseorang dalam struktur hierarki, sedangkan peranan merupakan perilaku aktual dari status (Lawang, 1985).

Informasi lainnya juga diungkapkan informan lainnya, yakni Bapak H. L.M. Kariu yang menyatakan bahwa:

> "Kelas-kelas sosial dalam masyarakat Buton dilihat dari perspektif dunia politik memiliki andil dan pengaruh yang besar. Banyak figur yang menggunakan sejarah kelas sosialnya sebagai alasan dan cara membentuk basis kekuatan politik. Contohnya saat ini dalam pemilihan walikota tahun 2018.Ada beberapa calon yang menggunakan kelas sosial sebagai strategi untuk meningkatkan popularitas" (Wawancara 08 Agustus 2017).

Faktualisasi pemahaman mengenai kondisi politik dikaitkan dengan kelas sosial sangatlah mempengaruhi kondisi masyarakat. Sebab kelas-kelas sosial memiliki peran dan andil yang besar dalam stuktur pemilih di Buton. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelas sosial. Bentuk itu akan dipengaruhi oleh kriteria atau faktor apa yang dijadikan dasar. Berikut ini akan kita pelajari beberapa bentuk kelas sosial menurut beberapa kriteria, yaitu ekonomi, sosial, dan politik.

Politik menurut Lawang, (1985) adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan *(decision making)* khususnya dalam negara. Dengan demikian ilmu politik adalah cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu sosial lainnya berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempelajari tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu.

Pemahaman lainnya juga dijelaskan oleh informan Bapak H. L.D Razinuddin yang menyatakan bahwa:

> "Politik di Buton itu sangat kompleks tidak hanya dilihat dari backround politik seorang figur akan tetapi berasal dari mana figur tersebut. Latar belakang seorang figur sangat penting karena dalam masyarakat Buton kepercayaan akan kelas-kelas sosial masih sangat tinggi" (Wawancara 07 Agustus 2017).

Kelas sosial dan politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik. Teori politik menurut Kuntowijoyo (1995) berkaitan dengan konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik. Tujuan politik adalah untuk berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak baik dalam politik, masyarakat harus mempelajari seni politik, asas dan nilai-nilai politik yang dianggap penting. Perspektif intelektual adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Perspektif tersebut bertolak dan dibangun berdasarkan pada apa yang dianggap salah oleh individu tersebut. Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan bermasyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan. Politik bertujuan untuk mencapai tujuan negara, di antaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Dijelaskan pula oleh informan lainnya yaitu Bapak Al Mujazi Mulku yang menyatakan bahwa:

> "Kondisi masyarakat Buton merupakan masyarakat yang berbudaya dan memelihara budaya, jadi sangatlah wajar ketika nilai-nilai budaya masuk sampai pada peta perpolitikan. Hal tersebut dikarenakan jiwa kebutonan yang memahami kelas sosial sebagai sebuah hikayat warisan leluhur sehingga wajar kiranya nilai budaya masuk pada perpolitikan".(Wawancara 03 Agustus 2017).

Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan fungsi kelas sosial pada masyarakat Buton berpengaruh signifikan dalam perpolitikan meskipun bentuknya tidak nampak. Fenomena yang terjadi di Buton berkaitan dengan prinsip dan penjelasan para ahli (Bungin, 2007) yang menyatakan budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan politik berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando dalam masyarakat.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sejarah kelas sosial di Keraton Buton merupakan hasil bentukan dari Wa Kaa Kaa. Hal tersebut didasari oleh sistem kerajaan Buton di mana tongkat kepemimpinan berdasarkan silsilah raja sebelumnya. Ukuran menjadi seseorang berasal dari kelas sosial asalnya. Jika garis nasabnya dari kelas *kaomu* maka seterusnya menjadi *kaomu* dan ketika nasabnya *walaka* maka seterusnya *walaka* begitupula *parabela* dan *babatua*.
2. Bentuk dan fungsi kelas sosial dalam masyarakat Buton memiliki bentuk yang beragam, *kaomu* bentuknya dari nasab bangsawan melalui Wa Kaa Kaa dan berfungsi sebagai Raja, bentuk *walaka* melalui nasab garis keturunan dari bangsawan yaitu *Mia Patamia* dan berfungsi sebagai pemilih dan melantik raja dari kelas *kaomu*, dan *papara/parabela* bentuknya dari loyalis kerajaan Buton yang memilih untuk menjaga *kadhie* dan berfungsi menjaga *kadhie*, dan *babatua* merupakan bentuk budak pelayan kerajaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Budi. (2008), *Stratifikasi Sosial dan Diferensi Sosial.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Anwar, Yesmil dan Andang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas.*Bandung: PT Rerika Aditama.

Bungin, M. Buhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Darmawan, Yusran. 2012. *Menyibak Kabut di Keraton Buton*. Baubau: Respect.

Darmawan, Yusran 2009. *Naskah Buton, Naskah Dunia.* Baubau: Respect.

Kasijanto, dkk. 2006. *Pedoman Penulisan Sejarah Lokal.* Jakarta: Direktorat Niai Sejarah.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.

Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

Lawang, R.M.S. 1985. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Konika.

La Niampe. 2014. *Nasihat Leluhur untuk Masyarakat Buton–Muna.* Jakarta: Mujahid Press.

Scrool, Pim. 2003. *Mayarakat Sejarah dan Budaya Buton.* Jakarta: Penerbit Djambatan..

Soekanto, Soejono. 1980. *Kedudukan dan Peran Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kurilah Esa.

_____ .1982. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

_____ .2013. *Sosiologi Suatu Pengantar Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafinado Persada.

Susanto S., Astrid. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Masyarakat.* Bandung: Bina Cipta.

Yoseph. 1997. *Pengertian Teori Strukturalisme dalam masyarakat.*Jakarta: CV. Rajawali.

Zuhdi, Susanto. 2010. *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Press.